

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Sedangkan “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu entitas. Laporan keuangan pemerintahan merupakan media informasi akuntansi untuk melaporkan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan inilah yang menjadi sarana informasi dalam proses pengambilan keputusan. Agar nilai informasi akuntansi bisa bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut, maka sebuah informasi harus dapat memenuhi kualitas tertentu. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berlaku. "Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Menurut Dwi Prastowo (2017:7), karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi:

1. Dapat Dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh para pemakai.
2. Relevan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan (*predictive*), menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (*confirmatory*).
3. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat Diperbandingkan Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Udiyanti et al (2014) Dengan diterapkannya standar akuntansi

pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur desa dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan desa bahkan organisasional tentang pemerintahan. Menurut Putri et al, (2015) Kualitas sumber daya manusia adalah

kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa. Peningkatan kapasitas desa sangat penting agar kepala desa dapat bersinergi dengan amanah Undang-undang desa.

Pada dasarnya kompetensi aparat pemerintahan desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan aparatur desa lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam melaksanakan sistem pelaporan keuangan desa dirasa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah bekerja lama atau telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintah dana desa dengan baik dibandingkan dengan kepala desa yang baru.

Dalam suatu pemerintahan desa, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten guna memperoleh laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2012: 146), sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan desa, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada pemerintah desa sangat penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Menurut Sugiyanto (2012) volume transaksi keuangan pemerintah desa menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa agar menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Disahkannya kriteria pemerintah desa oleh undang-undang terkait, maka menimbulkan sebuah pertanyaan serta isu terkait dengan kemampuan para pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Menurut beberapa pihak peraturan tersebut dirasa sangat longgar dalam hal penentuan kriteria Pemerintah desa yang akan mengelola dana desa yang tidak sedikit dan memiliki prosedur yang sama dengan pengelolaan dana anggaran belanja daerah. sebagaimana diketahui sejak diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut maka pemerintah desa memiliki wewenang menyelenggarakan pengelolaan dana desa secara menyeluruh tanpa ada intervensi dari pihak luar. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra apakah pemerintah desa mampu mengelola dana desa tersebut sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa. BPK menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di kalangan DPR, muncul

kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Media Akuntansi, 2014).

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut dengan judul yang diajukan oleh peneliti adalah :“ PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (Studi kasus di Kecamatan Tambusai Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi Pemerintahan Kecamatan Tambusai Utara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa khususnya pada desa di Kecamatan Tambusai Utara diantaranya: Bangun Jaya, Mahato Sakti, Mekar Jaya, Pagar Mayang, Payung Sekaki, Rantau Sakti, Simpang Harapan, Sukadamai, Tambusai Utara, Tanjung Medan dan Mahato dengan menetapkan kaur keuangan/bendahara desa sebagai sampel penelitian.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Inapty dan Martiningsih (2016), melakukan penelitian dengan judul ” Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan penerapan audit internal terhadap kualitas informasi lapotan keuangan”. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah,

kompetensi aparatur dan penerapan audit internal memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada variabel bebasnya yaitu adanya penambahan variabel teknologi informasi pada penelitian yang penulis lakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II** : Merupakan kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis.
- BAB III** : Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta analisis data.
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.
- BAB V** : **PENUTUP**
BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. “Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

Menurut Sinaga (2015), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2.1.2 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut PP No. 71 (2010:1) kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya menjadi acuan bagi:

1. Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar.
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsir informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintah. Terjadinya pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dimasa depan.

2.1.3 Lingkungan Akuntansi Pemerintah

Menurut PP No. 71 (2010:2) lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintah:

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.
 - 3) Adanya pengaruh proses politik
 - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah.
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target-target fiskal, dan sebagai alat pengendaliannya.
 - 2) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2.1.4. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Catatan atas Laporan Keuangan harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan. Ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan pedoman pada Undang-undang No. 6

Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya..

3. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

5. Akuntansi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

6. Akuntansi Investasi. Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut :

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai..

7. Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan.

8. Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai.

9. Koreksi kesalahan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya.

10. Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2. Kompetensi Aparatur

2.2.1. Pengertian Kompetensi

Menurut Amir (2015:86) menjelaskan bahwa kompetensi ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin (2016:13) yang mengartikan bahwa kompetensi merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Moenir (2016:116), kompetensi adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi dengan sendirinya juga kata sifat dan

keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kompetensi merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

2.2.2 Jenis-jenis Kompetensi

Ada 3 jenis kompetensi yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal (Robins, 2016), yaitu:

1. *Technical Skill* (Kemampuan Teknis). Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.
2. *Human Skill* (Kemampuan bersifat manusiawi). Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.
3. *Conceptual Skill* (Kemampuan konseptual). Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

Kreitner (2016:34) membagi kompetensi menjadi dua jenis yaitu :

1. Kapabilitas kognitif atau kecerdasan yang menggambarkan kapabilitas individu untuk berpikir konstruktif, mempertimangkan dan penyelesaian masalah.

2. Kapabilitas fisik yang unik pada setiap tugas dalam pekerjaan.

2.2.3. Indikator Kompetensi

Menurut Kusumasari (2014:48) sumber daya dan indikator penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah:

1. Kelembagaan. Yaitu penganturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.
2. Sumber Daya Manusia. Yaitu memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen bencana.
3. Keuangan Yaitu memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam manajemen bencana
4. Teknis. Yaitu memiliki sistem logistik manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat.

Menurut Keputusan Kepala BKN Nomor 46A tahun 2007 menjelaskan, untuk menganalisis kekuatan dan kompetensi sumber daya, indikator yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah :

1. Pengetahuan, diukur dari :
 - a. Memahami tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan dengan baik.
 - b. Memahami Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

2. Keterampilan, diukur dari :
 - a. Kemampuan yang dimiliki pegawai dalam membuat jurnal.
 - b. Kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.
3. Sikap, diukur dari :
 - a. Komitmen yang dimiliki pegawai
 - b. Bekerja sesuai peraturan yang berlaku

2.3. Teknologi Informasi

2.3.1. Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Setiawan (2015:2) menyatakan bahwa: “teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Mas’ud (2016:2) menyatakan bahwa “teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

2.3.2 Indikator Teknologi Informasi

Menurut penelitian Ngguna (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penggunaan teknologi informasi yaitu :

1. Fasilitas yang mendukung, yaitu ketersediaan sistem yang mendukung kelancaran kerja
2. Jaringan yang terintegrasi, yaitu penggunaan jaringan untuk menghubungkan antar unit satuan kerja

3. Software yang mendukung, yaitu penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan.
4. Pemanfaat teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi untuk membantu penyelesaian tugas.
5. Penggunaan software sesuai peraturan perundangan, yaitu pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa dimensi tentang indikator teknologi informasi dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu :

1. Kemanfaatan meliputi :
 - a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
 - b. Bermanfaat (*usefull*)
 - c. Menambah produktifitas (*increas productivity*).
2. Efektivitas meliputi :
 - a. Mempertinggi efektifitas (*enchance effectiveness*)
 - b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve the jobperformance*).

2.4. Kualitas Laporan Keuangan

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Adapun dalam (Fahmi, 2013) menurut Munawir mengatakan “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi bersifat finansial. Disamping itu (Assauri, 2015) “Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Adapun menurut (Thomas, 2013), menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah “laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (historis).”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam suatu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut harus dilaksanakan menurut cara tertentu yang lazim dan berterima umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan.

Adapun menurut APB Statement No. 4 dalam (Harahap, 2016), laporan ini bersifat deskriptif dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.
2. Tujuan Umum. Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
 - a. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
 - b. Untuk menunjukkan posisi keuangan dan kelemahan perusahaan.
 - c. Untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya.

- d. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
- a. Memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang saham.
 - b. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perlunasan perusahaan.
 - c. Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
 - d. Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3) Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

3. Tujuan Kualitatif

Tujuan kualitatif yang dirumuskan APB *Statement* No. 4 adalah *Relevance, Understandability, Verifiability, Neutrality, Timeliness,*

Comparability dan Completeness. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi menurut Pura (2013:11), yaitu:

1. Dapat dipahami. Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis.
2. Relevan. Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.
3. Keandalan/Reliabilitas. Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap.
4. Dapat dibandingkan/Komparabilitas. Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
5. Netral. Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

6. Tepat waktu. Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkan informasi tersebut.
7. Lengkap. Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga akan menyesatkan pembacanya.

2.4.3. Komponen-komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan ini.

Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.4.4. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
- c) Tepat waktu.
- d) Lengkap.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a) Penyajian jujur.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).
- c) Netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5. Hasil Penelitian yang Relevan

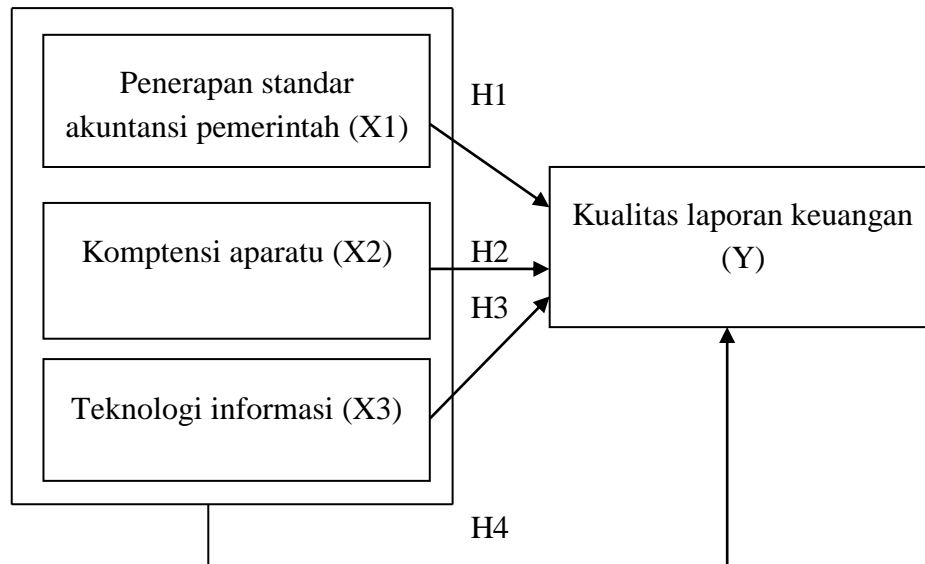
Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Inapty dan Martiningsih (2016)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan penerapan audit internal terhadap kualitas informasi lapotan keuangan	1. Variabel bebas terdiri dari : a. penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) b. kompetensi aparatur (X2) c. penerapan audit internal (X3) 2. Variabel terikat adalah kualitas informasi lapotan keuangan (Y)	Regrsi linier berganda	Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan penerapan audit internal memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi lapotan keuangan.
Wulandari (2018)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi	1. Variabel bebas terdiri dari : a. penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) b. kompetensi sumber daya manusia (X2) 2. Variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan (Y) 3. Variabel moderasi yaitu komitmen organisasi	MRA (<i>Moderated regression analysis</i>)	1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Interaksi penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Drama (2014)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening (Studi empiris pada SKPD Kota Solok)	1. Variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X1) 2. Variabel terikat adalah kualitas informasi laporan keuangan (Y) 3. Variabel mediasi (intervening) (X2) yaitu pengendalian internal	MRA (<i>Moderated regression analysis</i>)	1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Solok. 2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Rahman (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	1. Variabel bebas yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi 2. Variabel terikat adalah kualitas informasi laporan keuangan (Y)	Resgresi linier berganda	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
Rahayu dan Lasmara (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	1. Variabel bebas yaitu Kompetensi Sumberdaya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal 2. Variabel terikat adalah kualitas informasi laporan keuangan (Y)	Resgresi linier berganda	kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci

2.6. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang akan dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa.
- H₂ : Diduga kompetensi aparatur secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa.
- H₃ : Diduga teknologi informasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa.

H₄ : Diduga penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada permasalahan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan khususnya pada Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari 11 desa.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2016:23) merupakan penelitian yang lebih menekankan pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka serta data analisis menggunakan prosedur statistik. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei, dimana data dari populasi dikumpulkan dengan instrumen kuesioner.

3.3. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua subyek atau obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Sugiyono, 2016:23). Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada setiap Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh yaitu pegawai yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara meliputi pegawai pada bagian keuangan, bendahara dan kepala desa, maka total sampel dalam

penelitian ini adalah dengan total 33 responden. Adapun desa yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Data Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Sampel
1.	Bangun Jaya	3 orang
2.	Mahato	3 orang
3.	Mahato Sakti	3 orang
4.	Mekar Jaya	3 orang
5.	Pagar Mayang	3 orang
6.	Payung Sekaki	3 orang
7.	Rantau Sakti	3 orang
8.	Simpang Harapan	3 orang
9.	Suka Damai	3 orang
10.	Tambusai Utara	3 orang
11.	Tanjung Medan	3 orang
Sampel Total		33 orang

Sumber: Data olahan Penelitian, 2022

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang datanya diperoleh langsung dari sumbernya. Responden akan menjadi sumber langsung dari penelitian ini. Sementara sumber data dalam penelitian berasal dari pegawai yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer, yaitu data yang berasal langsung dari sumber asli atau pertama melalui *instrument* yang disebut kuesioner yang diantarkan, dititipkan atau dikirimkan kepada pegawai di Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada Kantor Desa diantaranya: bagian keuangan,

bendahara dan kepala desa. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara, yaitu mendatangi langsung pegawai yang bekerja di Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara dengan sebelumnya menelpon terlebih dahulu untuk persetujuan mengisi kuesioner dan menghubungi kerabat-kerabat yang dikenal secara pribadi bekerja di Kantor Desa se-Kecamatan Tambusai Utara yang dituju, untuk dibagikan kepada rekan-rekannya.

3.6. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas terdiri dari :
 - a. Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah .
 - b. Kompetensi aparatur (X2) adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki masing-masing aparatur untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Teknologi informasi (X3) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.
2. Variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan (Y) adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun indikator setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut Ini:

Tabel 3.2
Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Penerapan standar akuntansi pemerintah (X1)	UUno. 6 tahun 2014 a. Penyajian lapotan keuangan b. Laporan relaisasi anggaran berbasis kas c. Laporan arus kas d. Catatan atas laporan keuangan e. Akuntansi persediaan f. Akuntansi investasi g. Akuntansi asset tetap h. Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan i. Akuntansi kewajiban j. Koreksi kesalahan k. Laporan keuangan konsolidasi
2.	Kompetensi aparatur (X2)	Keputusan Kepala BKN Nomor 46A tahun 2007 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Perilaku
3.	Teknologi informasi (X3)	Ruswanto Ngguna (2017) 1. fasilitas yang mendukung 2. jaringan yang terintegrasi 3. Sofware yang mendukung 4. Pemanfaat teknologi 5. Penggunaan software sesuai peraturan perundangan
4.	Kualitas laporan keuangan (Y)	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

3.7 Instrumen Penelitian

Setiap variabel akan diukur dengan menggunakan indikator variabel. Indikator dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2016:34). Selanjutnya jawaban responden akan diberi skor atau nilai dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari:

- a. SS (Sangat Setuju) = Skor 5
- b. S (Setuju) = Skor 4
- c. KS (Kurang Setuju) = Skor 3
- d. TS (Tidak Setuju) = Skor 2
- e. STS (Sangat Tidak setuju) = 1

3.8 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiyono, 2016:54).

2. Uji Asumsi klasik

a. Normalitas data

Menurut Sugiyono (2016:81) uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas

digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:110). Kriteria pengujian, jika nilai Sig. Pada uji kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,5 (Sig.>0,05), maka data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil atau besar. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara *dependent variable* dengan *independent variable* yang dapat dinyatakan dengan rumus (Sugiyono, 2016:340):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Kualitas laporan keuangan
- a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X = 0
- b = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X₁ = Penerapan standar akuntansi pemerrintah
- X₂ = Kompetensi aparatur
- X₃ = Teknologi informasi
- e = Standar error

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas (pendapatna). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016:83).

c. Uji-t (Uji parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Uji t dapat juga dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1 , H_2 dan H_3

- $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1 , H_2 dan H_3

d. Uji F (Uji bersama-sama)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak/ bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability = 5% (α = 0,05)

- Jika $sig > \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima H_4 ditolak.

- Jika $sig < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak H_4 diterima

**BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN**